

"Waktu tidak berpihak pada kita": Respons internasional yang gagal terhadap kudeta Myanmar

Laporan akhir Penyelidikan Parlemen Internasional tentang respons global terhadap krisis di Myanmar (IPI)

Ringkasan Eksekutif

Sejak militer Myanmar melakukan kudeta pada 1 Februari 2021, situasi di negara tersebut terus memburuk. Junta militer yang dipimpin oleh Jendral Senior Min Aung Hlaing telah berperang secara brutal melawan rakyatnya sendiri, melakukan kekejaman yang tak terhitung jumlahnya, dan menghancurkan perekonomian negara. Aparat militer telah membunuh setidaknya 2.371 orang dan membuat ratusan ribu orang mengungsi, membuat jumlah pengungsi internal di Myanmar mencapai lebih dari 1,3 juta orang. Junta juga telah memenjarakan lebih dari 15,000 tahanan politik dan secara rutin menyiksa mereka yang ditangkap, semuanya sambil melancarkan tindakan keras terhadap kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat, termasuk represi intens terhadap media independen dan masyarakat sipil.

Demonstrasi damai besar-besaran yang dilakukan segera setelah kudeta, serta Gerakan Pembangkangan Sipil (CDM) di mana ratusan ribu orang bergabung dalam mogok umum, termasuk di seluruh birokrasi, menunjukkan penolakan besar-besaran terhadap kembalinya kekuasaan militer. Kudeta juga telah meningkatkan persatuan ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya di antara mereka yang menentang militer, termasuk lintas etnis.

Pada April 2021, Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) Myanmar dibentuk, menyatukan anggota parlemen yang digulingkan dalam kudeta, perwakilan etnis minoritas dan aktor masyarakat sipil. NUG dengan tepat mengklaim mandat sebagai wakil sah rakyat Myanmar. NUG menikmati legitimasi dan dukungan populer yang tersebar luas, terutama di jantung negara itu, dan mewakili pemerintah paling inklusif dalam sejarah Myanmar. NUG telah menyatakan komitmen untuk

membentuk konstitusi baru dan demokrasi federal sejati di Myanmar, yang akan menjadi langkah besar menuju pemenuhan aspirasi otonomi etnis minoritas negara itu.

Upaya junta untuk menundukkan perlawanan dengan kekerasan ekstrim gagal secara dramatis, dan hanya memperburuk ketegangan yang ada dan mendorong beberapa aktivis anti-junta untuk beralih ke perjuangan bersenjata untuk membela diri. Kelompok milisi anti-militer yang dikenal sebagai pasukan pertahanan rakyat (PDF)—beberapa di bawah komando NUG—telah didirikan di seluruh negeri, termasuk di daerah-daerah yang sebelumnya relatif damai. Kudeta juga telah memicu gelombang kekerasan baru antara militer dan organisasi bersenjata etnis (EAO), yang telah berjuang untuk otonomi selama beberapa dekade di perbatasan negara itu. Beberapa dari EAO ini, seperti sayap bersenjata Persatuan Nasional Karen (KNU) dan Organisasi Kemerdekaan Kachin (KIO), telah bersekutu dengan NUG. Tidak semua EAO secara resmi bergabung dengan perjuangan anti-militer, karena lanskap politik Myanmar tetap sangat kompleks dan terpecah-pecah.

Kekerasan yang meningkat telah mempercepat keruntuhan ekonomi dan krisis kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. PDB Myanmar telah turun 13% persen sejak 2019, dan 40 persen populasi negara tersebut sekarang hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Di saat kebutuhan meningkat, organisasi kemanusiaan mengalami kesulitan untuk menjangkau populasi yang rentan dan terpinggirkan, karena militer telah membatasi akses terhadap bantuan kemanusiaan.

Komunitas internasional sebagian besar telah terbukti tidak mampu merespons krisis ini secara efektif. Sekutu internasional junta—terutama Rusia dan China—telah muncul sebagai pendukung yang teguh dan tak bersyarat, memasok senjata dan legitimasi kepada rezim yang terisolasi. Namun, pemerintah asing yang mengaku sebagai pendukung demokrasi tidak mendukung retorika mereka dengan kekuatan tindakan yang sama. Walaupun sejumlah negara telah memberlakukan sanksi yang menarget para pemimpin junta dan aset pribadi mereka, upaya ini tetap tidak terkoordinasi dan gagal menarget entitas penghasil pendapatan utama, seperti Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE). Perserikatan Bangsa-Bangsa khususnya terhambat oleh perpecahan internal dan terbukti tidak mampu memproyeksikan pengaruh. NUG telah menarik pendukung secara global dan terus menduduki kursi Myanmar di PBB, tetapi sebagian besar pemerintah ragu-ragu

untuk secara resmi mengakuinya, meskipun ada seruan dari parlemen dan advokat untuk melakukannya.

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), di mana Myanmar menjadi anggota, juga tersendat oleh perpecahan internal dan tidak dapat merespons secara efektif. “Konsensus Lima Poin” blok tersebut, yang ditandatangani pada April 2021 dan ditujukan untuk mengatasi krisis, telah gagal total, terhambat oleh kurangnya kemauan dari semua negara anggota ASEAN untuk menegakkannya, dan kepemimpinan militer di Myanmar yang tidak menunjukkan niat untuk menerapkannya sejak awal. Meski beberapa negara anggota, seperti Malaysia, telah menyerukan pendekatan baru, termasuk keterlibatan langsung dengan NUG dan kekuatan pro-demokrasi lainnya, negara anggota yang lain, seperti Thailand atau Kamboja, tetap bertahan sebagai pendukung junta.

Ketika Myanmar jatuh ke dalam perang saudara, kemungkinan negosiasi sebagai solusi untuk konflik telah tertutup sepenuhnya. Dialog yang dianjurkan dalam Konsensus Lima Poin ASEAN sudah tidak memungkinkan. Tanggung jawab terletak pada junta, yang tidak menunjukkan kesediaan untuk berdiskusi dengan pihak lawan dan sebaliknya hanya mengandalkan kekuatan dalam upayanya untuk membasmi semua bentuk oposisi. Eksekusi empat tahanan politik pada Juli 2022, eksekusi yudisial pertama di negara itu sejak 1988, menyoroti kebrutalan militer dan ketidaktertarikannya untuk bernegosiasi. Kudeta telah mengakhiri pengaturan pembagian kekuasaan sebelumnya dengan kepemimpinan sipil. Sekarang sebagian besar rakyat Myanmar telah menyatakan keinginan yang jelas untuk tidak kembali ke status quo sebelumnya.

Sembilan belas bulan setelah kudeta, junta militer tidak mampu mengkonsolidasikan kekuasaannya. Petak luas wilayah Myanmar diperebutkan antara militer dan pasukan yang terafiliasi dengan NUG atau EAO, dan dapat dinyatakan bahwa kudeta telah gagal. Di daerah-daerah di sepanjang perbatasan Thailand, EAO seperti KNU dan Partai Progresif Nasional Karenni (KNPP) bekerja sama, memberikan layanan dasar kepada penduduk, dan menunjukkan apa yang dapat terjadi di Myanmar masa depan, di mana kelompok-kelompok yang berbeda dapat bekerja sama dan tidak berkelahi di antara mereka sendiri. Jika negara ini mampu melepaskan diri dari tirani militer.



Masa depan Myanmar berada di ujung tanduk, tekanan eksternal pada militer dan dukungan untuk perlawanan mungkin menjadi faktor penentu dalam perjalanan konflik. Komunitas internasional bisa, dan harus, berbuat lebih banyak untuk membantu rakyat Myanmar mengirim militer kembali ke barak dan membangun demokrasi federal. Ini harus dimulai dengan secara substansial meningkatkan upaya untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang memburuk, mengintensifkan tekanan pada junta ilegal melalui sanksi terkoordinasi dan embargo senjata, dan mengakui NUG sebagai otoritas yang sah di Myanmar. NUG, serta EAO yang selaras, harus diberikan pendanaan dan program pengembangan kapasitas tentang pemerintahan dan federalisme. Tindakan harus segera diambil. Seperti yang dikatakan Khin Ohmar, aktivis Myanmar dan Ketua Progressive Voice dalam salah satu dengar pendapat lisan IPI, “waktu tidak berpihak pada kita”.

Rekomendasi

Negara-negara dan lembaga-lembaga internasional yang mengaku sebagai pendukung demokrasi di Myanmar harus bertindak. Jika mereka serius ingin membantu rakyat Myanmar di saat-saat genting ini, mereka harus memberlakukan kebijakan-kebijakan yang kreatif dan efektif untuk memberikan dukungan dan membuka jalan bagi masa depan Myanmar yang lebih baik. Junta Min Aung Hlaing telah gagal untuk mendapatkan kendali atas Myanmar, tetapi pasukan pro-demokrasi tidak dapat mengusir militer dari kehidupan politik Myanmar dengan kekuatan mereka sendiri. Pihak-pihak yang berjuang untuk demokrasi federal membutuhkan bantuan sebanyak-banyaknya dari sekutu di komunitas global.

Berikut rekomendasi IPI terkait apa yang dapat dilakukan oleh pendukung demokrasi di Myanmar sekarang:

1. Bantuan kemanusiaan

PBB, negara-negara donor, dan ASEAN harus:

- I. Secara signifikan menambah pendanaan dan sumber daya yang dialokasikan untuk bantuan kemanusiaan di Myanmar.
- II. Bekerja sama dengan masyarakat sipil Myanmar sejauh mungkin. Di wilayah-wilayah yang tidak dikuasai oleh junta, terutama di sekitar perbatasan dengan Thailand dan India, bantuan harus disalurkan melalui organisasi masyarakat sipil lokal dan kelompok bersenjata etnis.
- III. Memberikan dukungan keamanan, logistik, dan ekonomi kepada organisasi masyarakat sipil lokal dan kelompok bersenjata etnis agar mereka dapat meningkatkan aktivitas mereka.

IV. Memberikan tekanan dan menawarkan insentif kepada negara-negara tetangga (terutama Thailand, India, dan Bangladesh) untuk mendorong mereka untuk

V. Menerima pengungsi dari Myanmar dan memberikan bantuan finansial dan logistik kepada negara-negara tetangga yang menerima pengungsi.

2. Tekanan kepada junta Min Aung Jlaing:

PBB, negara-negara donor, dan ASEAN harus:

I. Mengucilkan SAC secara diplomatik dengan tidak menerima perwakilan junta di semua pertemuan resmi tingkat tinggi, termasuk di PBB dan ASEAN.

II. Menangguhkan semua kerjasama antar militer dengan militer Myanmar.

III. Menerapkan sanksi terkoordinasi dan terarah pada junta:

-Meminta pemerintah yang belum memberikan sanksi kepada Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE), khususnya Amerika Serikat, untuk melakukannya sesegera mungkin.

-Meningkatkan koordinasi internasional dalam memberikan sanksi kepada junta. Sebuah gugus tugas multinasional dapat dibuat untuk mencapai tujuan tersebut.

3. Dukungan kepada pihak-pihak pro-demokrasi:

PBB, negara-negara donor, dan ASEAN harus:

I. Mengakui NUG sebagai otoritas yang sah di Myanmar dan perwakilan dari pemerintah yang dipilih secara demokratis.

II. Memberikan dana kepada NUG, dan EAO yang menentang junta (seperti KNU atau KIO).

III. Mengizinkan pergerakan bebas untuk perwakilan dari NUG dan EAO, serta aktivis pro-demokrasi lainnya, dengan mengeluarkan visa dan paspor khusus jika perlu, sehingga mereka dapat melakukan perjalanan untuk melobi untuk tujuan mereka

IV. Mengizinkan NUG untuk membuka delegasi di negara-negara lain dan organisasi-organisasi internasional, seperti Uni Eropa dan ASEAN, dan menggunakan delegasi tersebut sebagai saluran bagi para pemimpin EAO untuk melibatkan negara asing dalam diplomasi jalur ganda.

V. Mendorong dan memfasilitasi dialog antara NUG dan EAO untuk merundingkan pengaturan masa depan untuk demokrasi federal di Myanmar, jika perlu dengan menawarkan tempat di luar negeri untuk mengadakan pertemuan dan forum. NUG harus didorong dengan kuat untuk memulihkan kewarganegaraan Rohingya tanpa syarat dan menerima kembalinya mereka yang mengungsi di Bangladesh selama bertahun-tahun.

VI. Dukung para aktivis muda Gerakan Pembangkangan Sipil dengan beasiswa di universitas-universitas di kawasan atau program pendidikan daring.

VII. Membangun kapasitas pihak-pihak pro-demokrasi, termasuk NUG, dalam pemerintahan, ilmu politik, hubungan internasional, dan federalisme.

4. Rekomendasi untuk ASEAN:

ASEAN dan negara-negara anggota ASEAN harus:

I. Mengakui bahwa Konsensus Lima Poin telah gagal dan bahwa junta Min Aung Hlaing bukanlah mitra yang dapat diandalkan. ASEAN harus meninggalkan Konsensus Lima Poin dalam bentuknya yang sekarang dan:

-Menegosiasikan kesepakatan baru tentang krisis di Myanmar dengan NUG dan perwakilan EAO.

-Menyediakan kesepakatan baru dengan mekanisme penegakan.

II. Tinjau kembali mandat Pusat Koordinasi ASEAN Untuk Bantuan Kemanusiaan pada Manajemen Bencana (AHA Center), agar efektif dalam situasi konflik. Juga:

-Memperkuat pendanaan dan kapasitas logistiknya.

-Menyertakan pihak-pihak pro-demokrasi dalam pembahasannya dan bekerja dengan mereka dalam memberikan bantuan kemanusiaan.

III. Mengubah mandat dan mekanisme pengangkatan Utusan Khusus untuk Myanmar, sehingga:

-Posisi tersebut menjadi posisi penuh waktu.

-Utusan Khusus ditunjuk oleh semua anggota ASEAN, bukan oleh Ketua ASEAN yang bergilir. Utusan Khusus harus mewakili, dan bertanggung jawab kepada, ASEAN secara keseluruhan, bukan hanya Ketua.

IV. Memberikan suaka dan perlindungan hukum kepada pengungsi yang melarikan diri dari Myanmar, termasuk Rohingya dan anggota kelompok etnis lain yang melarikan diri sebelum kudeta.